

Pedagang Kaki Lima 180° dalam “PKL Kontroversi Kota dan Solusi Bersama”

180° Street Vendors in “PKL Kontroversi Kota dan Solusi Bersama”

Muhammad R. Iskandar

^{1,2}*Prodi Ilmu Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: muhammadrobyiskandar@gmail.com*

Abstract. "Wait a minute, there is a Tibum officer. I have to be unseen." An Obsolete diorama are keep spinning around as long as the author knows "Tibum", quite far from white and red uniform. The presence of PKL in the big cities is often identified as social illness pathology. Its existence is considered to disturb the aesthetics of the city, public order, and even violate the rights of other road users. Whereas a number of research prove that they are the pole of this nation's economy, especially when this country hit by crises, in-between in 1998. Nowadays, a group of organic intellectuals called Komune Rakapare try to lift up the prestige also the degree of PKL through the media superiority. An alternative channel which defeature all about obsolescent views of PKL. This resistance spread wisely not only for the audience which affected by PKL stigma, but also for bureaucratic tables in order to reconsider policy. This research intended for viewing why, how, and what the results of resistance are. With qualitative research methods, specifically Van Dijk's Critical Discourse Analysis approach, the author tries to analyze the booklet "PKL Kontroversi Kota and Solusi Bersama" which is made by Komune Rakapare as a form of resistance for the audience which affected by PKL stigma. Furthermore, the author also intends to promote the implications of such alternative media in the social sphere of contemporary society. Komune Rakapare itself, is a youth organization. The goals of each movement are to "overcome the grassroots problems of motherland by initiating the change at once." The output of their activities is usually in the form of interpretation which is published to the public. Eventually, this research wants to reveal the meaning and certain ideology of Komune Rakapare for the stigma of the audience towards the presence of PKL, especially in Bandung.

Keywords: Critical Discourse Analysis, Hegemony, Stigma, PKL, Alternative Media.

Abstrak. “Sebentar ya *dik*, ada petugas *Tibum*. *Mamang* sembunyi dulu.” Diorama usang dan terus berulang sedari penulis kenal kata “Tibum”, jauh ketika berseragam putih-merah. Kehadiran Pedagang Kaki Lima di kota-kota besar memang kerap diidentifikasi sebagai patologi sosial. Kehadirannya dianggap mengganggu estetika kota, ketertiban umum bahkan melanggar hak pengguna jalan lain. Padahal sejumlah penelitian membuktikan mereka adalah tonggak perekonomian bangsa ini kala dilanda sejumlah krisis, salah satunya di tahun 1998. Kekinian, sekelompok intelektual organik bernama Komune Rakapare mencoba mengangkat harkat derajat PKL via kedigdayaan media. Saluran alternatif ini setidaknya memutarbalikan segala pandangan usang ihwal PKL. Resistensi ini melayang tidak hanya untuk khalayak yang terhegemoni stigma, melainkan ke meja-meja birokrasi untuk kembali menimbang segala kebijakan. Penelitian ini ditujukan guna menilik mengapa, bagaimana, dan apa hasil resistensi tersebut. Dengan metode penelitian kualitatif, spesifiknya pendekatan Analisis Wacana Kritis milik Van Dijk, penulis mencoba membedah buklet “PKL Kontroversi Kota dan Solusi Bersama” besutan Komune Rakapare demi menelaah perlawanannya terhadap stigma khalayak ihwal PKL. Tentunya, penulis juga berniat untuk mengangkat implikasi media alternatif tersebut dalam lingkup sosial masyarakat kekinian. Komune Rakapare sendiri, merupakan sebuah organisasi kepemudaan. Adapun tujuan setiap pergerakan mereka adalah “mengatasi berbagai permasalahan akar rumput ibu pertiwi dengan turun langsung memulai perubahan itu sendiri.” *Output* dari hasil kegiatan mereka biasanya berupa kajian yang dipublikasikan kepada masyarakat. Penelitian ini pada akhirnya ingin mengungkap makna dan ideologi tertentu dari Komune Rakapare atas stigma khalayak terhadap kehadiran PKL khususnya di Kota Bandung.

Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis, Hegemoni, Stigma, Pedagang Kaki Lima, Media Alternatif.

A. Pendahuluan

Umumnya, Pedagang Kaki Lima di Indonesia telah lama menyandang stigma sebagai "Jerawat Kota". Cap buruk yang bertahan sedari masa kolonial Hindia Belanda hingga saat ini. Hanggoro (2013) mencatat kembali cerita Susan Black Burn yang

menuliskan, PKL di zaman itu terbiasa berteriak untuk menarik perhatian pembeli. Suasana gaduh yang ditimbulkan menuai ketidaksukaan penduduk sekitar –mayoritas orang-orang Belanda. Alhasil, Pemerintah Hindia Belanda melakukan pengusiran terhadap pedagang.

Diceritakan pula, pasca kemerdekaan jumlah pedagang kaki lima di Batavia terus tumbuh dengan pesat. Dewan Perwakilan Kota Sementara (DPKS) Jakarta di tahun 1950an menyatakan; PKL sebagai salah satu biang keladi dari konflik penduduk dan ketidakteraturan kota. Mulai dari titik inilah PKL menjadi kambing hitam atas mayoritas permasalahan perkotaan. Susan Blackburn mencatat, pada 1960-an pedagang kaki lima terus mendapatkan stigma buruk, seperti merusak keindahan kota, cara dagang yang primitif dan membuat malu negara saat kedatangan tamu-tamu luar negeri.

Lebih dari dua abad berlalu, stigma ini masih tetap berjaya di benak mayoritas masyarakat perkotaan. Udji Asiyah (2012) menyatakan bahwa PKL sebagai sektor informal senantiasa tidak mendapatkan diskriminatif dari sejumlah pihak. Selain dianggap melanggar ketertiban umum, tidak memperhatikan keindahan kota, mereka pun dianggap sebagai perilaku patologi sosial. Hal inilah yang membuat PKL berada dalam posisi termarjinalkan.

Stigma negatif yang terlanjur terbangun, justru menjadi ironi bila dibandingkan dengan kontribusi PKL untuk perekonomian bangsa. Rully Indrawan (dalam Gasper Liauw, 2015) mengungkapkan bahwa ekonomi negara ini sangat ditopang oleh keberadaan Usaha Kecil Usaha Menengah (UMKM) yang kebanyakan bergerak di sektor informal. Bahkan ketika dilanda krisis ekonomi tahun 1998, keberadaan PKL tetap menjaga daya beli masyarakat. Menurut Kristian Widya Wicaksono dan Tutik Rachmawati (2015), PKL menjadi pasar alternatif yang mampu menyediakan bahan kebutuhan masyarakat dengan harga yang terjangkau, bahkan di saat krisis sekalipun.

Fakta-fakta ini dijadikan alasan oleh sejumlah pihak untuk mengulurkan tangannya kepada jajaran PKL. Salah satunya Komune Rakapare, sebuah organisasi kepemudaan. Lewat media advokasi yang mereka prakarsai, penulis mendapati unggahan buklet bertajuk “PKL Kontroversi Kota dan Solusi Bersama” yang berisikan bantahan atas sejumlah stigma dalam memandang kehadiran PKL. Tentunya hal ini yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh.

Setidaknya ada tujuh fokus masalah yang di bahas dalam buklet setebal 32 halaman ini. (1) Ihwal PKL yang di stigmakan sumber kemacetan, (2) Stigma PKL yang melanggar hukum dan aturan Perda Kota Bandung. (3) Stigma PKL melanggar dan merebut hak pejalan kaki. (4) Stigma PKL yang merusak keindahan kota. (5) Stigma ketidaktahuan diri PKL atas jasa pemerintah. (6) Pemerintah membutuhkan waktu untuk mendesain tempat relokasi dan (7) Barang dagangan PKL tidak orisinal. Semua pembahasan ini dikemas dengan cukup ringan, disertai ilustrasi-ilustrasi yang menggambarkan kehidupan pedagang kaki lima. Penulis menganggap sebagai media komunitas, Rilis.rakapare.org sarat akan wacana pro PKL yang menarik untuk ditelaah.

Dengan penjelasan di atas penulis tertarik mengangkat penelitian dengan fokus; “Bagaimana Resistensi Komune Rakapare dalam *Buklet* “PKL Kontroversi Kota dan Solusi Bersama” Terhadap Stigma Kehadiran PKL di Kota Bandung?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui resistensi Komune Rakapare terhadap Stigma Kehadiran PKL di Kota Bandung yang ditunjukkan dalam dimensi teks buklet “PKL Kontroversi Kota dan Solusi Bersama” ?

B. Landasan Teori

Media telah menjadi sarana utama bagi khalayak untuk mengalami dan belajar tentang ragam aspek dunia. Menurut Ibrahim dan Akhmad (2014: 3-8) para pengkaji

media dan budaya kritis telah menggunakan ragam pendekatan untuk memahami arti penting sosio-kultural media dalam kehidupan sehari-hari, yang hasilnya didapati media sering kali bertindak sebagai pembentuk, cermin, pengemas atau representasi, guru, ritual, atau yang paling ekstreme media bertindak sebagai Tuhan.

Sejumlah pengkaji efek media memperhatikan betul penjabaran poin ke tiga dalam uraian di atas. Ditulis Rakhmat (2011: 222) seleksi yang dilakukan media berujung pada pembentukan dan perubahan citra. "Realitas yang ditampilkan media adalah realitas yang sudah diseleksi atau realitas tangan kedua (*second hand reality*).” Keterbatasan dari komunikasi untuk mengecek ulang segala informasi dari media membuat mereka mempercayai realitas tersebut. Akhirnya membentuk citra tentang lingkungan sosialnya berdasarkan realitas kedua tersebut.

Dewasa ini, media diasumsikan telah melakukan komodifikasi terhadap pesan-pesan yang disampaikannya. Komodifikasi ini diartikan Vincent Mosco (2009) sebagai "Proses mengubah barang dan jasa, termasuk komunikasi, yang dinilai karena kegunaannya, menjadi komoditas yang dinilai karena apa yang mereka berikan di pasar." Ibrahim dan Akhmad (2011: 25) lewat perspektif komodifikasi budaya, memaparkan bahwasanya media adalah industri yang menyebarkan budaya secara masal. Nantinya budaya yang dikonstruksikan media akan berhadapan –di dalam pasar— dengan budaya-budaya berbasis lokal yang sudah tumbuh dalam masyarakat. Hal inilah yang dirujuk Maryani (2011) tentang *public wants* yang belum tentu merupakan *public needs*.

Media senantiasa memiliki apa yang dinamakan wacana. Atau dapat pula di artikan sebagai sesuatu alat yang mereproduksi hal yang lain. Wacana adalah salah satu alat untuk menghegemoni sebuah ideologi ataupun budaya dominan. Dan lewat wacana pula pemahaman seseorang senantiasa direkonstruksi. Marx menyadari peran sentral media dalam peperangan kekuasaan ini –ia lebih menitikberatkan pada pertarungan ideologi di dalam isi media. Sementara Habermas menyebutkan "Media merupakan sebuah realitas di mana ideologi dominan dalam hal ini kapitalisme disebarkan kepada khalayak dan membentuk apa yang disebutnya sebagai kesadaran palsu (*false consciousness*) ini terbentuk atas dasar kepentingan kelompok dominan untuk menjaga kepentingannya. Dengan menyadari hal ini, Maryani (2011) menilai bahwa media massa tidak hanya sebuah saluran komunikasi, akan tetapi juga menjadi institusi di tengah masyarakat dengan pertarungan ideologi di dalamnya.

Krusialnya keadaan masyarakat kapitalis lanjut yang telah dikemukakan sebelumnya, memungkinkan lahirnya resistensi di kalangan sub ordinat. Menurut Maryani (2011) istilah 'resistensi' tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan dan upaya dominasi sesuai konteks waktu, tempat dan kejadian tertentu. Istilah resistensi pun tidak hanya berlawanan dengan sesuatu, juga merupakan sumber untuk menghadapi sesuatu yang memarjinalkan, menindas bahkan menghilangkan. Sementara maksud dari 'kalangan sub ordinat' dapat dipastikan sebagai kalangan yang merasa kebutuhannya tidak terakomodir bahkan merasa terdiskriminasi oleh kekuasaan.

Resistensi sendiri terjadi karena secara struktural di mana budaya masyarakat tertentu memiliki kekuatan untuk mempertahankan eksistensinya ketika mereka tidak nyaman dengan sesuatu yang berasal dari luar budayanya. Lebih jauh, resistensi dapat menjelma menjadi *counter-hegemonic*. Syarat terjadinya *counter-hegemonic* menurut Gramsci, menuntut peran intelektual organik yang mampu mendidik dan menyadarkan masyarakat terhegemoni dari tindak hegemoni tersebut. Konsep *critical pedagogy* yang dikemukakan Gramsci dan diteorisasikan Paulo Freire adalah salah satu opsi yang dirasa paling relevan dalam menyadarkan pihak-pihak terhegemoni atas kedudukan.

Bila merujuk pemikiran Habermas tentu berkaitan dengan masyarakat emansipatif yang diwujudkan lewat rasionalitas komunikasi. Dalam memunculkan kesadaran kritis tersebut diperlukan suatu ruang saluran yang mampu menyebarkan sebuah ideologi. Sebagaimana yang dikemukakan Marx bahwa media merupakan alat untuk menyebarluaskan sebuah ideologi, maka dari itu untuk me-*counter* hegemoni, dibutuhkan pula peran serta media.

Media yang penulis teliti biasa disebut dengan media komunitas, karena berisikan orang yang hidup di tempat yang sama atau memiliki ketertarikan dan kepentingan yang sama. Karena dikelola secara swadaya, memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok minor, dan bahkan sering kali bersifat kritis –terkadang oposisi- terhadap kelompok dominan. Sebagaimana yang dituliskan Ibrahim dan Akhmad (2014: 203) bahwasanya media atau penerbitan komunitas dapat digolongkan dalam media alternatif.

Pengertian media alternatif dalam kajian budaya yang dikemukakan Sullivan yakni sebagai berikut: *“Forms of mass communication that avowedly reject or challenge established and institutionalized politics, in the sense that they all advocate change in society, or at least a critical reassessment of traditional values.”* Merujuk pada pengertian tersebut, maka secara mendasar media alternatif dianggap sebagai saluran untuk melawan kekuatan atau kemapanan politik. Selain itu yang terpenting pula memiliki implikasi perubahan sosial dalam masyarakat, salah satunya bersikap lebih kritis terhadap nilai-nilai tradisional.

Mengkaji media alternatif tentunya akan berkaitan dengan konsep ruang publik dari Habermas. Memahami kedudukan media yang sentral di ranah publik tentunya memahami pula kemampuan media sebagai ruang publik bagi khalayaknya. Maryani sendiri mengklasifikasikan media alternatif merintis sebuah ruang publik autentik. Maksudnya adalah ruang yang terbentuk atas proses komunikasi yang diselenggarakan institusi nonformal dan mengorganisasikan dirinya sendiri. Komunikasi yang terjalin bersifat horizontal, inklusif dan diskursif karena para aktornya sebagian besar berasal dari publiknya sendiri.

Bila dikaji dalam pendekatan ekonomi dan politik, Golding dan Murdock melihat adanya hubungan antara aktor-aktor sosial (intelektual organik) dengan struktur yang dibangun dalam melakukan perlawanan kepada birokrasi atau pihak-pihak lain yang dianggap mendominasi. Maryani (2011:69) dengan teori ini diharapkan dapat menjabarkan bagaimana media alternatif mengurangi distorsi komunikasi dengan mengupayakan situasi komunikasi ideal. Nantinya akan amat berpengaruh dengan kesadaran kritis khalayaknya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Resistensi Komune Rakapare terhadap Stigma Kehadiran PKL di Kota Bandung dalam Teks Buklet “PKL Kontroversi Kota dan Solusi Bersama.

Berikut adalah analisis mengenai Resistensi Komune Rakapare terhadap Stigma Kehadiran PKL di Kota Bandung dalam Teks Buklet “PKL Kontroversi Kota dan Solusi Bersama”. Perlu diketahui pula bahwasanya penelitian ini dilakukan dengan “pisau bedah” Analisis Wacana Kritis model Teun A. van Dijk. Berikut hasil analisis yang dimaksud.

Dari tujuh bab yang terkandung dalam buklet “PKL Kontroversi Kota dan Solusi Bersama” penulis berencana untuk meneliti seluruh bab, lengkap dengan serangkaian prolog di awal teks dan ilustrasi-ilustrasi yang melengkapinya. Dalam dimensi teks, yang dikaji lewat analisis teks kritis, penulis akan mengikuti skema yang telah di buat oleh Teun A. Van Dijk. Dalam Eriyanto (2000: 138) Van Dijk beranggapan suatu teks

terdiri atas beberapa struktur, dan setiap bagiannya saling mendukung.

Pertama struktur makro, atau makna global dari teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema. Selanjutnya superstruktur yang merupakan struktur wacana di mana terhubung dengan kerangka teks, pola-pola penyusunan teks sehingga menjadi cerita utuh. Terakhir struktur mikro, atau analisis yang mengamati bagian terkecil dari suatu teks. Baik berupa kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase, dan gambar. Sebagai gambaran dari model analisis teks Van Dijk, berikut penulis menyertakan tabel berisikan kerangka analisis teks:

Tabel 1. Kerangka Analisis Teks Teun A. Van Dijk

Kerangka Analisis Teks Teun A. Van Dijk

STRUKTUR WACANA	HAL YANG DIAMATI	ELEMEN	UNIT ANALISIS
STRUKTUR MAKRO	Tematik (Apa yang diutarakan?)	Topik	Judul dan Kata
SUPER STRUKTUR	Skematik (Bagaimana pendapat disusun menjadi sistematis?)	Skema	Judul, <i>lead</i> , isi, paragraf, kalimat dan kata
STRUKTUR MIKRO	Semantik (Makna yang ditekankan dalam teks)	Latar, detail, maksud, praanggapan	Paragraf, kalimat dan kata
	Sintaksis (Bagaimana pendapat disampaikan?)	Bentuk- bentuk kalimat, koherensi dan kata ganti	Paragraf, kalimat dan frase
STRUKTUR MIKRO	Stilistik (Pilihan kata apa yang dipakai?)	Leksikon	Paragraf, kalimat dan kata
	Retoris (Bagaimana dan dengan cara apa penekanan dilakukan?)	Grafis, Metafora, Ekspresi	Judul, paragraf, kalimat, kata dan foto

Setelah mengulas satu persatu struktur wacana dalam buklet "PKL, Kontroversi Kota dan Solusi Bersama" baiknya penulis sedikit memberi gambaran sederhana hasil penelitian ini lewat bantuan model. Adapun model yang penulis sematkan adalah bentuk penyederhanaan dari serangkaian analisis, dan dikawinkan dengan konsep yang telah dirumuskan Teund A. Van Dijk. Kehadiran model ini diharapkan memberikan benang

merah dari rangkaian panjang analisis teks. Berikut model yang penulis maksud:

Gambar 1. Sederhana Analisis Teks Buklet “PKL Kontroversi Kota dan Solusi Bersama”



Teks buklet yang penulis teliti dibedah lewat ketiga struktur wacana gagasan Van Dijk. Analisis ditahap struktur makro, berbuah diketahuinya tema utama dalam buklet ini adalah pedagang kaki lima. Lebih spesifiknya, mempertanyakan kembali cara pandang masyarakat luas ihwal PKL. Sementara, pada dimensi super struktur, penulis mendapati pola-pola penulisan teks yang penyusun buklet lakukan. Pola ini memudahkan khalayak dalam menerima wacana yang dilontarkan penyusun buklet. Lebih dalam lagi, saat mengkaji analisis mikro, penulis mendapatkan banyak penekanan yang memberi opsi alternatif dalam memandang PKL. Selain itu, sejumlah argumentasi pun dipaparkan dengan tujuan mematahkan stigma yang selama ini masyarakat berikan kepada PKL.

Secara keseluruhan, analisis ini mendapatkan bahwa teks buklet memberikan gambaran kondisi PKL di Kota Bandung. Hampir sebagian besar pembahasan, seolah mengajak pembacanya untuk kembali mempertanyakan stigma yang selama ini dilemparkan. Contohnya pada pembahasan bab “PKL Bikin Macet (?)” pembaca diajak berpikir ulang soal keabsahan stigma itu. Benarkah PKL yang memperparah kemacetan di beberapa titik ruas jalan Kota Bandung, atau ada faktor-faktor lain yang sebenarnya lebih bertanggungjawab soal kemacetan. Selanjutnya, peran penekanan dalam argumentasi yang penyusun siapkan amat mempengaruhi apakah wacana itu di terima atau tidak.

Tidak berhenti sampai membuat pembaca mempertanyakan stigma-stigma tersebut, penyusun pun memberikan serangkaian argumentasi dengan tujuan mempersuasi pembaca berpartisipasi aktif ihwal permasalahan yang tengah dihadapi PKL Kota Bandung. Aksi nyata pembaca dalam menanggapi permasalahan ini menjadi tujuan yang diharapkan penyusun buklet. Hal ini diasumsikan dengan ikut berdiskusi dan melakukan pergerakan bersama dalam pencarian dari masalah PKL.

D. Kesimpulan

Secara keseluruhan dimensi teks dalam buklet “PKL, Kontroversi Kota dan Solusi Bersama” adalah sebuah refleksi ketidakadilan kita (khalayak) dalam memandang keberadaan pedagang kaki lima di hiruk pikuk kehidupan urban. Wacana

resistensi terhadap stigma khalayak dalam memandang PKL ini selanjutnya disusun dengan apik di dalam ketiga struktur teks. Membantah dan mengkritisi stigma-stigma populer dari pedagang kaki lima, Komune Rakapare jadikan sebagai koherensi global dalam buklet ini. Ketujuh sub bab dalam pembahasan buklet mencoba mengajak pembacanya untuk kembali mempertanyakan keabsahan dari stigma yang biasa dilayangkan. Opsi alternatif dalam memandang PKL, setidaknya menjadi wacana yang ditujukan untuk menggeser kedigdayaan stigma. Tidak hanya menyerang khalayak sebagai pemberi stigma, sejumlah sub-tema pun menyinggung wacana pengusuran dan relokasi yang digagas negara dalam menyikapi permasalahan pedagang kaki lima.

Ketujuh bab di dalam buklet, bila ditinjau dari aspek superstruktur memiliki pola yang tidak jauh berbeda antara satu dan lainnya. Dibuka dengan pernyataan yang seolah-olah menyetujui stigma, diputarbalikan lewat argumentasi dari data lapangan dan informasi yang relevan dan di tutup ajakan bergerak bersama. Pemaparan induktif bergaya sebab akibat dan prinsip relevansi menjadi modal penyusun dalam berargumentasi di pemaparan setiap babnya. Permasalahan di dalam teks dibahas secara khusus dan saling sambung demi mencapai kesimpulan umum yang nantinya akan ditarik pembaca.

Sementara itu, kajian pada struktur mikro, tepatnya elemen semantik, wacana teks memberikan latar permasalahan soal stigma yang dirasa tidak sesuai sepenuhnya. Secara mendetail penyusun teks memaparkan argumentasi dari ketujuh stigma populer yang senantiasa khalayak lontarkan kepada pedagang kaki lima. Penekanan diberikan di beberapa bagian yang memang dirasa krusial oleh penyusun, semisal saat menyinggung sepak terjang negara (Pemerintah Kota Bandung) dalam menyelesaikan hal ini. Sementara seruan untuk berkontribusi aktif dalam pencarian isu ini jelas ditekankan secara eksplisit dalam beberapa kesempatan. Adapun bentuk kalimat, pilihan kata dan kata ganti yang digunakan dalam pembahasan buklet, penulis dapati menguatkan wacana yang dibangun oleh penyusun. Sejumlah penekanan grafis, baik lewat penebalan teks, *italic*, hingga sketsa-sketsa seputar kehidupan pedagang kaki lima pun berkontribusi besar dalam melancarkannya pemahaman yang hendak dibangun.

E. Saran

Saran Teoritis

Penelitian yang penulis lakukan tentunya tidak mencangkup seluruh aspek permasalahan yang mendera pedagang kaki lima. Sebagaimana diketahui penulis hanya meneliti lewat aspek komunikasi –khususnya wacana di media alternatif. Maka dari itu, penulis merasa dalam rangka mendapatkan hasil yang maksimal, amat membutuhkan penelitian dari pakem ilmu lainnya atau metodologi lainnya. Hal ini tentu amat membantu dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan yang mendera pedagang kaki lima.

Saran Praktis

Kalimat “penuntasan masalah PKL” sudah harus di ganti dengan “pengorganisasian atau pemberdayaan PKL” mengingat banyaknya kontribusi yang pedagang kaki lima berikan baik dalam lingkup ekonomi maupun sosial. Bila saat ini negara memiliki perhatian kepada sektor ekonomi kreatif, mengapa tidak dengan para pekerja sektor informal. Pembentukan serikat, hingga dewan yang melahirkan etika, etiket hingga payung hukum tentu amat berdampak baik bagi kepentingan bersama. Selain akan memudahkan dalam urusan pemberdayaan PKL, serikat pun akan menguatkan akses mereka untuk lebih di dengar suaranya. Selain itu, lewat cara ini pula

PKL dimungkinkan memiliki keterjaminan modal, lapak, program promosi, sosialisasi kebijakan terbaru, hingga konsumen. Tentunya hal ini harus terlepas dari individu bermental birokrat yang dikhawatirkan mengulang kesalahan yang sama. Organisasi ini akan lebih baik berjalan secara kolektif di antara sesama PKL, yang pada awalnya mendapatkan banyak *mentoring* baik dari para akademisi maupun praktisi terkait.

Tidak hanya Komune Rakapare yang seharusnya menjaga konsistensi mengawal persoalan ini. Sejumlah elemen masyarakat sewajibnya melakukan upaya nyata merealisasikan mimpi-mimpi tersebut. Hal yang amat indah tentunya bila bisa tetap mengonsumsi barang dan jasa dengan harga terjangkau dan dikoordinir secara baik.

Daftar Pustaka

- Asiyah, Udji. 2012. “Pedagang Kaki Lima Membandel di Jawa Timur”, dalam Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik Vol 25, No. 1, 2012 (hal. 47-55).
- Eriyanto. 2000. Analisis Wacana: Pengantar Pengenalan Untuk Analisis Teks Media. Jakarta.
- Hanggoro, Hendaru Tri. Dalam Historia.id. 29 Maret 2013. “Mula Pedagang Kaki Lima” <http://historia.id/kota/mula-pedagang-kaki-lima>. Tanggal akses 12 Januari 2016.
- Ibrahim, Idi Subandy, Bachruddin A. Akhmad. 2014. *Komunikasi dan Komodifikasi: Mengkaji Media dan Budaya dalam Dinamika Globalisasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Liau, Gaspar. 2015. *Administrasi Pembangunan: Studi Kajian PKL*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Maryani, Eni. 2011. *Media dan Perubahan Sosial: Suara Perlawanan Melalui Radio Komunitas*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2011. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Wicaksono, Kristian Widya, Tutik Rachmawati. 2015. “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima” Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan.